



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 27 November 2020

Halaman: 12

Gugus Tugas DIY Kaji Sanksi Finansial Pelanggar Protokol Kesehatan

JOGJA—Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY mengkaji penerapan sanksi finansial untuk para pelanggar protokol kesehatan guna menekan kasus positif COVID-19 di daerah ini. "Kami sudah mengusulkan sanksi finansial kepada pimpinan nanti akan dikaji lebih lanjut," kata Koordinator Pengamanan dan Penegakan Hukum Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, Noviar di Jogja, Kamis (26/11).

Menurut Noviar, selama ini sanksi sosial telah ditegakkan Satpol PP DIY terhadap para pelanggar protokol kesehatan mengacu Peraturan Gubernur DIY Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pengendalian COVID-19.

Sanksi sosial itu, di antaranya berupa menyapu jalan, menyanyi, hingga *push up*. Namun demikian, ia menilai sanksi itu perlu diperketat untuk meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan mengingat kasus positif COVID-19 di DIY masih terus melonjak.

"Lonjakan kasus positif sangat meningkat, maka harus diperketat protokol kesehatannya. Perlu dimunculkan efek yang lebih membuat jera lagi seperti



ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

Petugas memberhentikan pengguna jalan yang tidak mengenakan masker dalam razia untuk menegakkan protokol kesehatan di Pasar Kranggan, Jogja, Selasa (4/8).

sanksi finansial. Ini bukan masalah uangnya tapi efek jeranya," kata dia.

Meski demikian, sanksi finansial itu perlu diatur atau ditambahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 77.

Sembari menunggu hasil kajian di Gugus Tugas DIY, ia akan mendorong penerapan sanksi finansial diterapkan terlebih dahulu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta karena tiga wilayah itu telah memiliki peraturan bupati dan wali kota yang mengatur tentang sanksi finansial.

"Kami akan mendorong Satpol PP kabupaten/kota yang sudah ada aturan sanksi finansial untuk diterapkan karena sampai saat ini belum ada yang menerapkan," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadamanta Baskara Aji meminta penegakan hukum protokol kesehatan diperketat seiring masih tingginya kasus penularan COVID-19 di daerah ini disertai menurunkan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. (ANTARA)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005